



Dorong Maksimalkan Potensi Desa

Untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat

PONTIANAK-Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson memberikan arahan kepada aparat desa dalam rangka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa (P3PD) Tahun 2024 di Hotel Garuda, Rabu (28/8).

Melalui program P3PD, pemerintah melakukan penguatan kapasitas bagi aparatur Pemerintah



ARAHAN: Harisson saat memberikan arahan dalam rangka Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Tahun 2024, Rabu (28/8).

Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa, agar lebih mampu mengelola pemerintahan, menyelesaikan

persoalan, dan memanfaatkan potensi, serta aset desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Kalbar, dikatakan Harisson, telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal kemandirian desa. Untuk itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara kepala desa dan berbagai pihak terkait, seperti BPD, PKK, Kader Posyandu, serta tokoh masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Seperti persoalan prevalensi stunting, anak putus sekolah, pernikahan dini, ancaman narkoba, hingga masalah judi online.

"Alhamdulillah, sejak tahun 2023, Kalbar sudah tidak lagi memiliki desa sangat tertinggal, dan pada 2024, desa tertinggal juga telah dienyahkan," katanya.

Saat ini, lanjut dia, di seluruh kabupaten se-Kalbar sudah tak ada lagi desa yang masuk kategori sangat tertinggal. Melainkan hanya ada desa dengan kategori berkembang, maju, dan mandiri.

"Kemudian sebagaimana arahan dari pemerintah pusat tentang fokus penggunaan dana desa, sangat jelas, terutama dalam menangani masalah stunting,

memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dan meningkatkan ketahanan pangan," ujarnya.

Harisson juga berharap, kepala desa bersama perangkat desa lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan sumber-sumber pendapatan asli desa (PADes). Kepala desa juga diminta memberikan insentif kepada kader Posyandu, membentuk tim trantib linmas desa, serta mendukung tenaga pendidik PAUD dan kader kesehatan lainnya. Itu semua harus dijalankan sesuai dengan kewenangan desa, sebagaimana tercantum

dalam Permendes 7/2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

"Kemudian, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu sumber pendapatan potensial, di samping aset desa lainnya yang dapat dioptimalkan misalnya disewakan, seperti pasar desa dan fasilitas umum," katanya.

Tak hanya itu, Harisson juga mengingatkan seluruh anggota BPD untuk menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Dan dapat membantu kepala desa dalam mengelola APBDes agar tidak terjadi penyimpangan. (bar/ri)